



Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng

Laporan Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bulan Mei Tahun 2026



**Lantai 3 Pasar Banyuasri Kecamatan
Buleleng**



(0362) 22063
<https://dpmpptsp.bulelengkab.go.id>
dpmpptsp@bulelengkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas berkat karunianya dapat menyelesaikan Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja (CRAAPK) bulan Mei Tahun 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/ 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja bulan Mei Tahun 2026 ini, secara substansi merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menginformasikan tentang pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2026 dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Dengan dokumen ini diharapkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng mampu mewujudkan serta mempetanggungjawabkan kinerjanya baik kepada atasan maupun kepada masyarakat berkaitan dengan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan serta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil (*outcome*), yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Sudah barang tentu penyusunan Dokumen Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja bulan Mei Tahun 2026 ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Semoga Dokumen Capaian Rencana

Aksi Atas Perjanjian Kinerja bulan Mei Tahun 2026 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2026 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI

iv

BAB I PENDAHULUAN

Error!

Bookmark not defined.

1.1. Latar Belakang

2

1.2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

3

1.3. Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

5

BAB II CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

7

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Error!

Bookmark not defined.

2.2. Indikator dan Target Kinerja

Error!

Bookmark not defined.

BAB III PENUTUP

11

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyusunan Capaian Rencana Aksi ini merupakan wujud nyata dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Dokumen ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Buleleng sejalan dengan target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, DPMPTSP harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng. Capaian Rencana Aksi berfungsi sebagai jembatan antara target tahunan dengan visi jangka panjang daerah, seperti peningkatan nilai investasi dan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja, setiap instansi diwajibkan melakukan pemantauan kinerja secara periodik. Dokumen ini disusun untuk memotret realisasi kinerja per triwulan atau semester, guna mengidentifikasi hambatan sejak dini dan menentukan langkah perbaikan agar target di akhir tahun anggaran dapat tercapai secara maksimal.

Penyusunan capaian ini didorong oleh komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil (*result-oriented government*). Hal ini krusial bagi DPMPTSP Buleleng untuk menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan daya saing daerah melalui pelayanan terpadu satu pintu yang akuntabel dan efisien.

1.2 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Penyelenggaraan

PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan Non Perizinan yang proses proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat Penyelenggaraan Penyelenggaraan PTSP Daerah bertujuan :

- A. Meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kapasitas hukum kepada masyarakat;
- B. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima, dan
- C. Meningkatkan kemudahan berusaha berusaha dan daya saing daerah.

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan oleh PTSP meliputi :

- 1. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- 2. Penerbitan dokumen Izin dan Non Izin;
- 3. Penyerahan dokumen Izin dan Non Izin; dan
- 4. Pencabutan dan pembatalan dokumen Izin dan Non Izin.

Dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkaitan dengan Investasi Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, berupaya melalui pembentukan kelembagaan dengan nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng secara administratif resmi berdiri pada tahun 2008.

Pelayanan Terpadu yang selanjutnya pada tahun 2020 terjadi perubahan nama Dinas sesuai dengan nomenklatur terbaru yaitu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng per tanggal 2 Januari 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Pada tahun 2022 terjadi perubahan Struktur sesuai dengan nomneklatur terbaru yaitu Perubahan Jabatan Strukturan menjadi Fungsional Umum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Struktus dan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - b. Jabatan Fungsional Perencanaan
3. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
4. Jabatan Fungsional Penata Perizinan

Struktur organisasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng seperti pada Gambar

A. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



jdik.bulelengkab.go.id

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Buleleng

1.3 Tujuan Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja

Capaian Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja bulan Mei Tahun 2026 yang berfungsi sebagai panduan operasional tahunan dan tindak lanjut suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, target tahunan, target per bulan, realisasi dan capaian. Adapun tujuan umum diterapkannya Capaian Rencana aksi atas Perjanjian Kinerja bulan Mei Tahun 2026 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah

- a. Intensifikasi dalam upaya Pencegahan Korupsi
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik
- c. Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparatif dan akuntabel

Sedangkan tujuan khususnya adalah :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur pemerintah
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah
- d. Tolok ukur pencapaian kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

1.4. Capaian Rencana Aksi (CRA-PK)

Capaian ini merupakan hasil evaluasi terhadap indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan. Berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi DPMPTSP Buleleng, fokus utama capaian meliputi:

1. Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat perekonomian daerah melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Berdasarkan data terbaru hingga awal 2026, capaian pada sasaran ini adalah

a). Persentase Realisasi Investasi

Mengukur total nilai rupiah investasi (PMDN dan PMA) yang masuk ke Kabupaten Buleleng. Pada tahun 2026,

b). Persentase Nilai Investasi.

Berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif untuk melihat sejauh mana Kabupaten Buleleng mampu mengonversi potensi sumber daya menjadi aset ekonomi produktif. Capaian ini tidak hanya diukur dari jumlah modal yang masuk, tetapi juga dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dukungan Program Prioritas:

- 1). Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal: Melalui pemantauan kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
 - 2). Program Promosi Penanaman Modal: Melalui kegiatan pemetaan potensi investasi unggulan dan partisipasi dalam forum bisnis daerah maupun nasional
2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- Sasaran ini difokuskan pada peningkatan standar layanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel, capaian pada sasaran ini adalah
- a). Persentase Capaian Penanaman Modal dan PTSP Sesuai Ketentuan.
Mengukur kepatuhan SOP dalam seluruh tahapan pelayanan penanaman modal.
 - b). Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai Ketentuan.
Memastikan seluruh dokumen perizinan yang diterbitkan melalui sistem OSS RBA telah memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).
 - c). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Berdasarkan survei periodik, nilai IKM DPMPTSP Buleleng secara konsisten berada pada kategori "Sangat Baik", mencerminkan kepuasan pelaku usaha terhadap layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP).
- Dukungan Program Prioritas & Penunjang:
- 1). Program Pelayanan Penanaman Modal.
Optimalisasi layanan berbantuan (*helpdesk*) bagi pelaku usaha yang mengalami kendala teknis.
 - 2). Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
Pengembangan basis data yang terintegrasi untuk mendukung kebijakan investasi berbasis data (*data-driven policy*).
 - 3). Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
Dukungan administrasi perkantoran, sarana prasarana, dan peningkatan kapasitas SDM aparat untuk menjamin kelancaran operasional dinas.

BAB II

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Mengacu pada sasaran, program, indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tabel diatas, selanjutnya ditetapkan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2026 ini merupakan tindak lanjut tekad dan janji tahun 2026 dari para pejabat dan staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng yang menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan pada akhir tahun nanti sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian.

Tabel 10.

Perjanjian Kinerja Induk Tahun 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET/SATUAN	
1	2	3		4	
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	1	Realisasi Nilai Investasi	77	%
		2	Persentase Nilai Investasi	100	%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1	Persentase Capaian Penanaman Modal yang Sesuai Ketentuan	100	%
		2	Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai Ketentuan	100	%
		3	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	Nilai

Pada bulan pebruari 2026 DPMPTSP melaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja karena adanya perubahan pagu dengan penyesuaian perhitungan asuransi PPK paruh Waktu 2026. Pada Perubahan mendahului mendapatkan tambahan pagu sebesar Rp, 242.685.667 dari Pagu Anggaran Induk Sejumlah Rp10,214,501,105. menjadi Rp10.457.186.772 dengan rincian penalokasian sebagai berikut :

Tabel 11
Pagu Pergeseran Tahun 2026

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.36.160.000	APBD 2026
2	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.74.230.802.	APBD 2026
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.26.513.180	APBD 2026
4	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 5.502.400	APBD 2026
5	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.10.314.780.390.	APBD 2026
TOTAL		Rp.10.457.186.772	APBD 2026

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng Tahun 2026 sampai dengan bulan Desember belum optimal dikarenakan belum adanya perbub terkait APBD dan belum ada Juklak dan Juknis Bidang Penanaman Modal dan PTSP dari Pusat, namun dari bidang pelayanan tetap melayani secara langsung maupun Online yang masuk pada sistem Online Single Submission (OSS) dan SIAJAIB hal ini dapat dilihat jumlah izin yang masuk sampai dengan bulan Mei sejumlah 3.450 Izin.

2. Pencapaian Rencana Aksi

Berdasarkan Renstra dan IKU DPMPTSP terdapat 2 sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Nilai Investasi Daerah” dan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” dengan 5 indikator kinerja Utama yaitu

I. Meningkatkan Nilai Investasi Daerah dengan 2 indikator kinerja yaitu

1. Persentase Realisasi Investasi, Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal realisasi keuangannya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu capaian keuangan 9,11% sesuai dengan kebutuhan belanja dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan yang sudah jalan namun masih menunggu proses pencairan, dan untuk capaian kinerja pada kegiatan ini mencapai 27.94% dan akan dilaksanakan kegiatan pengawasan pada pelaku usaha yang memiliki NIB
2. Persentase Nilai Investasi, pada Program Promosi Penanaman Modal belum ada realisasi keuangan karena masih menunggu proses pencairan dari bendahara karena terkendala Anggaran Kas yang di pasang pada TW II. Untuk pelaksanaan kegiatan pencapaian kegiatan baru 37.17% dengan 2 sub kegiatan yang mengampu yaitu :
 - Pada sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi PM sudah melaksanakan kegiatan sesuai Tusinya diantaranya :
 - Januari Penyusunan Strategi Promosi PM Menyiapkan bahan promosi berupa pemaparan pada sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng
 - Februari Penyusunan Strategi Promosi PM menyiapkan bahan promosi berupa pemaparan pada sektor primer (budidaya shorgum) di Kabupaten Buleleng dan
 - Maret Penyusunan Strategi Promosi PM Menyiapkan bahan promosi berupa pengumpulan data dan pemaparan pada sektor sekunder (industri garam) di Kabupaten Buleleng
 - April Penyusunan Strategi Promosi PM Menyusun profil usaha sektor hilirisasi kopi bubuk “ Sindu Kopi Bubuk”, Menyiapkan bahan promosi berupa pengumpulan data dan pemaparan pada sektor hilirisasi (Sindu Kopi Lemukih) di di Kabupaten Buleleng
 - Mei Persiapan mengikuti kegiatan Bali Investmen Challenge
 - Sub kegiatan Pelaksanaan promosi PM
 - Januari Melaksanakan kegiatan promosi secara daring dengan KJRI Karachi dengan minat investasi pada perhotelan, agro-tourism dan restoran
 - Februari melaksanakan pengumpulan data UMKM yang sudah terkurasi.
 - Maret Menyusun dan mempublikasikan video promosi sektor sekunder yaitu industry garam di Kabupaten Buleleng

- April Menyusun dan mempublikasikan video promosi sektor hilirisasi yaitu Sindu Kopi Lemukih di Kabupaten Buleleng, Menyusun dan video promosi agrowisata petik strawberi di Kabupaten Buleleng, Memverifikasi datapelaku usaha UMKM
- Mei Mempublikasikan video promosi penanaman modal yaitu video agrowisata petik strawberry Desa Pancasari

II. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan 3 indikator kinerja yaitu

1. Persentase capaian penanaman modal yang sesuai ketentuan sudah tercapai 100% dari target tiap bulannya 100 % hal ini dapat di buktikan dengan penyusunan laporan kinerja dilakukan setiap bulan dan dikirim tepat waktu.
2. Persentase Penerbitan Ijin oleh Program Pelayanan Penanaman Modal realisasi keuangan sudah mencapai target sesuai dengan kebutuhan belanja dengan mempertimbangkan anggaran kas dan kegiatan pelayanan perizinan sudah mencapai 3.450 Izin terbit dari target 6500 setahun atau 53.08% per mei 2026 (per Mei mencapai 127% dari target 41.67 terealisasi 53.08)
3. Indeks Kepuasan Masyarakat untuk realisasi capaian perhitungan nilai IKM 2026 di Triwulan I mencapai 87,20 dari target setiap tahunnya 85.00 sehingga untuk nilai IKM sementara sudah melebihi target yang ditetapkan hal ini menunjukkan keberhasilan dan pelayanan terhadap masyarakat sudah sangat memuaskan

Capaian Rencana Aksi Atas perjanjian Kinerja Bulan Mei 2026 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 12.

CAPAIAN RENCANA AKSI DPMPSTP KABUPATEN BULELENG TAHUN 2026

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR	Capaian Tahun Sebelumnya	Bulan Mei			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	Persentase realisasi investasi	3,64%	76%	26,03	34,25%	76%	34,25

	Persentase Nilai Investasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase capaian penanaman modal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penerbitan perizinan sesuai ketentuan	100%	100%	127%	100%	100%	100%
	Indeks kepuasan masyarakat	84	84	85,47	104,2%	84	104,2%

3. Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng, alokasi anggaran sebesar Rp. 10.457.186.772,00 realisasi sebesar Rp.3.674.686.695,00 atau 35.14%. Dengan capaian keluaran (Output) mencapai 37.64% yang dijabarkan melalui 5 Program, 9 Kegiatan dan 31 Sub kegiatan, sebagai berikut :

A) Program Penunjang (Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah)

1) Program Penunjang pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP kabupaten Buleleng terdiri dari 1 Program, 5 Kegiatan, dan 22 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.314.780.390,00 realisasi anggaran sebesar Rp.3.656.031.313,00 atau 29,82%. Dengan Capaian 44,69% , yang dijabarkan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.5.232.750,00 realisasi keuangan sebesar Rp.1.200.000,00 atau 22,93%, dengan capaian 52,36%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 5 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *dengan indikator Jumlah dokumen perencanaan* alokasi anggaran sebesar Rp.960.000,00 realisasi Rp.0 atau belum ada Dengan target 13 laporan dengan realisasi (*output*) 5 laporan atau 38,46%.

b) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD *dengan indikator Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi* alokasi anggaran sebesar Rp.1.062.750,00 realisasi Rp.0 atau belum ada

Dengan target 12 laporan dengan realisasi (*output*) 5 laporan atau 41,67%.

- c) **Sub Kegiatan** Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah alokasi anggaran sebesar Rp.710.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0 atau belum ada. Dengan target 45 laporan ,dengan realisasi (*output*) 18 laporan atau 40,00%.
- d) **Sub Kegiatan** Pelaksanaan pengumpulan data statistic sectoral daerah dengan indikator jumlah dokumen hasil penyelenggaraan walidata pendukung data sectoral alokasi anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 dan realisasi keuangan Rp.1.200.000,00 atau 96,00% dengan target 1 Data, dengan realisasi (*Output*) 1 Laporan atau 100%.
- e) **Sub Kegiatan** Pelaksanaan pengumpulan data statistic sectoral daerah dengan indikator jumlah data statistic sectoral daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup daerah lokasi anggaran sebesar Rp.1.250.000,00 belum ada realisasi keuangan atau 0% dengan target 24 Dokumen, dengan realisasi (*Output*) 10,00 Laporan atau 41,67%.

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.9.176.951.712,00 realisasi keuangan sebesar Rp.3.290.042.363,00 atau 35,85%, dengan capaian 40,78% Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) **Sub Kegiatan** Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah dokumen pembayaran gaji dan tunjangan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.099.167.106,00 realisasi Rp.3.264.262.187,00 atau 35,87%,. Dengan target 1.708 Orang/bulan,dengan realisasi (*output*) 666 Orang/bulan atau 38,99%.
- b) **Sub Kegiatan** Penyediaan administrasi pelaksanaan ASN dengan indikator Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN alokasi anggaran sebesar Rp.51.649.204,00 realisasi Rp.17.186.784,00 atau 33,28%. Dengan target 12 Dokumen, dengan realisasi (*output*) 5 Dokumen atau 41,67%.
- c) **Sub Kegiatan** Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD alokasi anggaran sebesar Rp.26.135.396,00 realisasi Rp.8.593.392,00 atau 32,88%. Dengan target 12 Dokumen, dengan realisasi (*output*) 5 Dokumen atau 41,67%.

1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.178.521.121,00 realisasi keuangan sebesar Rp.40.057.955,00 atau 22,44%, dengan capaian 38,10%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 7 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) **Sub Kegiatan** Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantordengan indikator Jumlah komponen instalasi listrik alokasi anggaran sebesar Rp.21.962.016,00 realisasi Rp.9.729.150,00 atau 44,30%. Dengan target 5 paket,

dengan realisasi (*output*) 3 paket atau 60,00%.

- b) **Sub Kegiatan** Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp.11.550.105,00 realisasi Rp.0 atau belum ada. Dengan target 4, dengan realisasi (*Output*) 0 atau belum ada.
 - c) **Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan logistik kantor *dengan indikator Jumlah sarana/prasarana upacara* alokasi anggaran sebesar Rp.75.465.860,00 realisasi Rp.13.918.300.,00 atau 18,44%. Dengan target 25 Paket, dengan realisasi (*output*) 10 paket atau 40,00%.
 - d) **Sub Kegiatan** Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan *dengan indikator Jumlah barang cetakan dan pengadaan* alokasi anggaran sebesar Rp.15.996.210,00 realisasi Rp.4.539.900,00 atau 28,38%. Dengan target 12 paket, dengan realisasi (*output*) 5 paket atau 41,67%.
 - e) **Sub Kegiatan** Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan *dengan indikator Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan* alokasi anggaran sebesar Rp.10.585.000,00 realisasi Rp.3.068.000,00 atau 28,98%. Dengan target 36 dokumen , dengan realisasi (*output*) 15 dokumen atau 41,67%.
 - f) **Sub Kegiatan** Fasilitasi Kunjungan Tamu *dengan indikator Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu* alokasi anggaran sebesar Rp.15.555.930,00 realisasi Rp.8.002.605,00 atau 51,44%. Dengan target 12 laporan, dengan realisasi (*output*) 5 laporan atau 41,67%
 - g) **Sub Kegiatan** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD *dengan indikator Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD* anggaran sebesar Rp.27.406.000,00 realisasi Rp.800.000,00 atau 2,92%. Dengan target 12 Laporan, dengan realisasi (*output*) 5 Laporan atau 41,67%.
- 1.4 Kegiatan** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.796.150.394,00 realisasi keuangan sebesar Rp.271.359.382,00 atau 34,08%, dengan capaian 40,63% Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 4 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
- a) **Sub Kegiatan** Penyediaan jasa surat menyurat *dengan indikator Jumlah surat terkirim* alokasi anggaran sebesar Rp.73.642.359,00 realisasi Rp.27.836.360,00 atau 37,80%. Dengan target 2 laporan, dengan realisasi (*output*) 0,83Laporan atau 41,67%.
 - b) **Sub Kegiatan** Penyediaan jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik *dengan indikator Jumlah rekening air, telepon dan listrik* alokasi anggaran sebesar Rp.288.061.267,00 realisasi Rp.95.266.567,00 atau 33,07%. Dengan target 24 laporan,dengan realisasi (*output*) 10 Laporan atau 41,67%.
 - c) **Sub Kegiatan** Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor *dengan indikator Jumlah unit kendaraan* alokasi anggaran sebesar Rp.188.478.000,00 realisasi Rp.62.826.000,00 atau 33,33%. Dengan target 12 laporan, dengan realisasi (*output*) 5

Laporan atau 41,67%.

- d) **Sub Kegiatan** Penyediaan jasa pelayanan umum kantor *dengan indikator alat kebersihan dan jumlah alat tulis kantor* alokasi anggaran sebesar Rp.245.968.752,00 realisasi Rp.85.430.455,00 atau 34,73%. Dengan target 16 laporan, dengan realisasi (*output*) 6 Laporan atau 37,50%.

1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.157.924.413,00 realisasi keuangan sebesar Rp.53.371.613,00 atau 33,80%, dengan capaian 51,61%. Pelaksanaan kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) **Sub Kegiatan** Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan *indikator Jumlah kendaraan dinas/operasional layak pakai* alokasi anggaran sebesar Rp.125.445.813,00 realisasi Rp.37.836.053,00 atau 30,16%. Dengan target 21 Unit, dengan realisasi (*output*) 12 Unit atau 57,14%.
- b) **Sub Kegiatan** Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya *dengan indikator Jumlah peralatan gedung kantor dalam kondisi baik* alokasi anggaran sebesar Rp.9.457.200,00 realisasi Rp.3.496.500,00 atau 36,97%. Dengan target 55 Unit, dengan realisasi (*output*) 23 Unit atau 41,82%.
- c) **Sub Kegiatan** Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya *dengan indikator Jumlah perlengkapan gedung kantor dalam kondisi baik* alokasi anggaran sebesar Rp.23.021.400,00 realisasi Rp.12.039.060,00 atau 52,30%. Dengan target 34 unit, dengan realisasi (*output*) 19 unit atau 55,88%.

B) Program Utama (Program Prioritas/Unggulan yang dilaksanakan SKPD)

Sedangkan pada Program Utama pada Urusan Penanaman Modal terdiri dari 4 Program, 4 Kegiatan, dan 9 Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 142.406.382,00 realisasi anggaran sebesar Rp.25.656.764,00 atau 36,82% Dengan Capaian 38.35%, yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) **Program** Promosi Penanaman Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.36.160.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau belum ada. Dengan capaian 25,66%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.36.160.000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau dengan capaian 37.17%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 2 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a) **Sub Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan Promosi Penanaman Modal *dengan indikator Jumlah Event pelaksanaan promosi yang dilaksanakan* alokasi anggaran sebesar Rp.23.330.000,00 realisasi Rp.0 atau belum ada. Dengan target 24 Laporan, dengan

realisasi (*output*) 9 Laporan atau 37.50%.

b) **Sub Kegiatan** Penyusunan strategi Promosi Penanaman Modal *dengan indikator Jumlah dokumen strategi promosi Penanaman Modal* alokasi anggaran sebesar Rp.12.830.000,00 realisasi Rp.0 atau belum ada. Dengan target 19 Laporan, dengan realisasi (*output*)7 Laporan atau 36.84%.

2) **Program** Pelayanan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.26.513.180,00 realisasi keuangan sebesar Rp.3.754.990,00 atau 14,16%. Dengan capaian 37,35%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut :

2.1 Kegiatan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar sebesar Rp. 26.513.180,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 3.754.990,00 atau 14,16%., Dengan capaian 37,35%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 3 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a) **Sub Kegiatan** Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik *dengan indikator Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan* alokasi anggaran sebesar Rp.10.543.880,00 realisasi Rp.1.776.000,00 atau 16,84%. Dengan target 6500 pelaku usaha , dengan realisasi (*output*) 3.450 . pelaku usaha atau 53.08%.

b) **Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha berbasis resiko** *dengan indikator Jumlah dokumen evaluasi tingkat kepuasan masyarakat* alokasi anggaran sebesar Rp.7.831.850,00 realisasi Rp.1.978.990,00 atau 25,27. Dengan target 300 pelaku usaha , dengan realisasi (*output*) 101 pelaku usaha atau 33.67%.

c) **Sub Kegiatan Pemantaun analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko** *dengan indikator Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko* alokasi anggaran sebesar Rp.8.137.450,00 realisasi Rp.0 atau belum ada. Dengan target 6500 pelaku usaha, dengan realisasi (*output*) 3.450 pelaku usaha atau 53.08%.

3). **Program** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.74.230.802,00 realisasi keuangan sebesar Rp.9.073.392,00 atau 12,22%, dengan capaian 27,94%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut:

3.1 Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 74.230.802,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 9.073.392,00 atau 12,22%, dengan capaian 27,94%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a) **Sub Kegiatan** Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku

Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya dengan indikator jumlah pelaku usaha yang mendapatkan tindak lanjut permasalahan penanaman modal alokasi anggaran sebesar Rp.44.129.602,00 realisasi Rp.8.593.392,00 atau 19,47%. Dengan target 6 kegiatan usaha, dengan realisasi (*output*) 2 Kegiatan usaha atau 33,33%.

b) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha *indikator* jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan alokasi anggaran sebesar Rp.25.690.000,00 realisasi Rp.0 atau belum ada. Dengan target 100 Pelaku Usaha, dengan realisasi (*output*) 15 Pelaku Usaha atau 15,00%.

c) Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal dengan indikator jumlah Proyek yang mendapat pengawasan alokasi anggaran sebesar Rp.4.411.200,00 realisasi Rp.480.000,00 atau 10,88%. Dengan target 200 Kegiatan Usaha, dengan realisasi (*output*) 71 Kegiatan Usaha atau 35,50%.

4). Program Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal indikator Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.5.502.400,00 realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau belum ada. Dengan capaian 41,67%. Adapun rinciannya dijabarkan sebagai berikut:

4.1 Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.5.502.400,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau belum ada. Dengan capaian 41,67%. Pelaksanaan Kegiatan ini dijabarkan melalui 1 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik dengan Pagu sebesar Rp. 5.502.400,00 realisasi keuangan sebesar Rp.0 atau belum ada. Dengan target 12 dokumen dengan realisasi (*output*) 4 Dokumen atau 41,67%.

Untuk dapat melihat ketercapaian indikator terhadap Program kegiatan Dinas Penanaman modal dan PTSP dan capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja bulan Mei 2026 dapat dilihat pada Tabel

BAB III

EVALUASI CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PK

Pelaksanaan evaluasi atas rencana aksi terhadap capaian kinerja DPMPTSP Bulan Mei 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan capaian bulan berjalan. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan ketepatan target didalam rencana aksi atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program secara aktual sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan sasaran dan indikator DPMPTSP Kabupaten Buleleng. Berikut akan kami sampaikan capaian peogram kegiatan yang dilakukan di tahun 2026 sebagai berikut :

1. Program Promosi Penanaman Modal pada bulan Mei 2026 telah melakukan pengumpulan data potensi investasi per wilayah dan per kecamatan.
2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Nilai total Realisasi Investasi PMDN maupun PMA sampai TW I tahun 2026 adalah Rp. 147.326.668.337 dari total target 700M atau 21,04% dengan capaian 27,68% (realisasi 21,04% : target 76%). Dimana data tersebut bersumber dari LKPM Sesuai Permen Investasi/BKPM No.5 th 2022 pelaporan LKPM bagi Pelaku Usaha dilakukan per triwulan bagi usaha menengah dan besar dan semester untuk usaha kecil.
3. Program Pelayanan Penanaman Modal bidang ini sudah menangani ijin yang masuk dalam sistem dengan jumlah izin/ pelaku usaha 3.450.
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Untuk Survey Kepuasan Masyarakat pada tw I sudah mencapai 102%
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara umum pencapaiannya sesuai kebutuhan belanja operasional dan gaji PNS dan P3K

3.1 Permasalahan

Secara umum capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng bulan Mei 2026 belum memperlihatkan pencapaian kinerja yang diinginkan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

3.2 Upaya Mengatasi Permasalahan

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng dalam mengantisipasi dan meminimalisasi permasalahan yang ada untuk meningkatkan kinerjanya untuk tahun berikutnya antara lain:

1. Melakukan kegiatan kelapangan dan mendampingi Pengusaha-pengusaha yang ada di daerah
2. Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pada pelaku usaha
3. Melaksanakan pendampingan terhadap pelaku usaha yang belum paham Mendaftarkan Usahanya dalam system OSS-RBA dan SIAJAIB
4. Mengoptimalkan kegiatan rutin sosialisasi tentang perijinan dan non perijinan langsung di wilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada, melalui media

elektronik, melalui brosur, pamflet ataupun medialainnya.

Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP diharapkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tugas dan kewenangan yang diberikan dapat meningkatkan dan memuaskan seluruh pelaku usaha atau masyarakat kabupaten Buleleng.

2.3 Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam PK

I. Meningkatnya Nilai Investasi Daerah dengan 2 indikator kinerja yaitu:

1. **Persentase Realisasi Investasi**, oleh Program Pengendalian Penanaman Modal realisasi keuangannya belum mencapai target sesuai dengan kebutuhan belanja dan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan sudah mencapai 27,68% dari target 76% pertahunnya
2. **Persentase Nilai Investasi**, oleh Program Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal belum melampaui target sesuai dengan kebutuhan belanja dengan mempertimbangkan anggaran kas namun pada kegiatan ini pencapaian kinerja sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100% tiap bulannya dan outputnya adalah Laporan kegiatan promosi PM

II. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan 3 indikator kinerja yaitu:

1. **Persentase capaian penanaman modal yang sesuai ketentuan** sudah tercapai 100% dari target tiap bulannya 100 %.
2. **Persentase Penerbitan Ijin oleh Program Pelayanan Penanaman Modal** realisasi keuangan sudah mencapai target sesuai dengan kebutuhan belanja dengan mempertimbangkan anggaran kas dan kegiatan pelayanan perizinan sudah mencapai 53,08% izin terbit atau target 6500 realisasi 3450 ijin

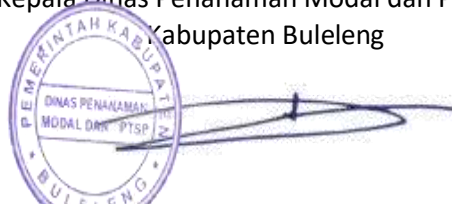
Indeks Kepuasan Masyarakat untuk realisasi capaian perhitungan nilai IKM 2026 di susun tiap Triwulan

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Pencapaian Rencana Aksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng bulan Mei 2026 ini di susun dengan harapan segala tugas yang telah di laksanakan pada bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dapat menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembangunan Kabupaten Buleleng yang lebih baik dalam rangka pencapaian visi Rencana Pembangunan Daerah dengan terwujudnya Buleleng Kerta Raharja Mengantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana.

Singaraja, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kabupaten Buleleng



Gea Niswah Dharma Seputra, ST.M.AP

NIP. 19710528 200312 1 006

CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2026

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	1	Persentase Nilai Investasi	%	77	Januari	0	0	0	Data Realisasi Investasi Disusun dan dirilis pada akhir tahun	Program Promosi Penanaman Modal	36.160.000	Januari	0	-	-	Program Promosi Penanaman Modal belum ada realisasi keuangan karena anggaran kas di bulan juli
						Pebruari	0	0	0				Pebruari	2.500.000	-	-	
						Maret	0	0	0				Maret	2.500.000	-	-	
						April	0	0	0				April	2.500.000	-	-	
						Mei	0	0	0				Mei	2.500.000	-	-	
						Juni	0						Juni	2.500.000			
						Juli	0						Juli	2.500.000			
						Agustus	0						Agustus	2.500.000			
						Oktober	0						September	2.500.000			
						Nopember	0						Oktober	2.500.000			
		Desember	77			Nopember	5.480.000										
						Desember	8.180.000										
		2	Persentase Nilai Investasi	%	100	Januari	100	100	100	Laporan Disusun Setiap Bulan	Program Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal	74.230.802	Januari	0	2.139.912	100	Program Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sudah ada realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan dan pembayaran PPPK Paruh waktu
						Pebruari	100	100	100				Pebruari	5.000.000	-	0	
						Maret	100	100	100				Maret	5.000.000	2.156.784	43,14	
						April	100	100	100				April	5.000.000	2.468.348	49,37	
						Mei	100	100	100				Mei	5.000.000	2.308.348	46,17	
						Juni	100						Juni	5.000.000			
						Juli	100						Juli	5.000.000			
						Agustus	100						Agustus	5.000.000			

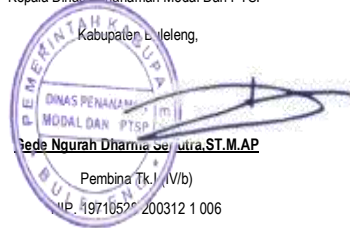
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1	Persentase Capaian Penanaman Modal yang Sesuai Ketentuan	%	100	September	100			Laporan Disusun Setiap Bulan	Program Pelayanan Penanaman Modal	26.513.180	September	25.000.000			Program Pelayanan Penanaman realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan bulan Mei 2026	
						Oktober	100						Oktober	5.000.000				
						Nopember	100						Nopember	5.000.000				
						Desember	100						Desember	4.230.802				
						Januari	100	100	100				Januari	0	-	-		
						Pebruari	100	100	100				Pebruari	1.000.000	-	-		
						Maret	100	100	100				Maret	1.000.000	-	-		
						April	100	100	100				April	1.000.000	-	-		
						Mei	100	100	100				Mei	1.000.000	3.754.990	375,50		
						Juni	100						Juni	1.000.000				
						Juli	100						Juli	1.000.000				
						Agustus	100						Agustus	1.000.000				
	September	100			September	1.000.000												
	Oktober	100			Oktober	1.000.000												
	Nopember	100			Nopember	9.942.680												
	Desember	100			Desember	7.570.500												
			2	Persentase Penerbitan Perizinan Sesuai Ketentuan	%	100	Januari	100	100	100	Laporan Disusun Setiap Bulan	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5.502.400	Januari	0	-	-	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Moda belum ada realisasi keuangan
							Pebruari	100	100	100				Pebruari	0	-	-	
							Maret	100	100	100				Maret	1.000.000	-	-	
							April	100	100	100				April	0	-	-	
							Mei	100	100	100				Mei	0	-	-	
							Juni	100						Juni	1.000.000			
							Juli	100						Juli	0			
							Agustus	100						Agustus	0			
September							100			September				1.000.000				
Oktober							100			Oktober				0				
Nopember							100			Nopember				0				
Desember							100			Desember				2.502.400				

3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	Januari	0	0	0	IKM disusun setiap Triwulan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.314.780.300	Januari	190.000.000	394.945.558	207,87	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah belum memenuhi target 100% karena sesuai pencairan gaji dan kebutuhan bulan Mei 2026
				Pebruari	0	0	0				Pebruari	900.000.000	627.635.063	69,74	
				Maret	85,00	87,20	102,59				Maret	900.000.000	1.091.025.392	121,23	
				April	0	0	0				April	900.000.000	809.285.151	89,92	
				Mei	0	0	0				Mei	900.000.000	738.967.149	82,11	
				Juni	85						Juni	900.000.000			
				Juli	0						Juli	900.000.000			
				Agustus	0						Agustus	900.000.000			
				September	85						September	900.000.000			
				Oktober	0						Oktober	1.065.718.234			
				Nopember	0						Nopember	900.000.000			
				Desember	85						Desember	959.062.066			
				TOTAL ANGGARAN (RP)									10.457.186.682	3.674.686.695	

Singaraja, 29 Mei 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP

Kabupaten Buleleng,



Nurrah Dharma Setiawan, ST.M.AP

Pembina Tk. I (V/b)

NIP. 197105202003121006

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Capaian Penanaman Modal yang Sesuai Ketentuan	1 Nilai AKIP yang baik	Nilai	66	Januari	0	0	0	Hasil Akip direlis pada bulan April	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.232.750	Januari	0	-	-	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah belum ada realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan bulan Mei 2026
					Pebruari	0	0	0				Pebruari	0	-	-	
					Maret	0	0	0				Maret	1.000.000	1.200.000	120,00	
					April	66	0	0				April	0	-	-	
					Mei	0						Mei	0	-	-	
					Juni	0						Juni	0			
					Juli	0						Juli	0			
					Agustus	0						Agustus	2.000.000			
					September	0						September	0			
					Oktober	0						Oktober	0			
					Nopember	0						Nopember	0			
		Desember	0			Desember	2.232.750									
		2 Persentase penyebaran kuesioner pengguna layanan	%	100	Januari	100	100	100	penyebaran kuesioner pengguna layanan dilakukan tiap bulan	Administrasi Keuangan	9.176.951.712	Januari	153.000.000	368.367.212	240,76	
					Pebruari	100	100	100								
					Maret	100	100	100								
					April	100	100	100								
					Mei	100	100	100								
					Juni	100										
					Juli	100										
					Agustus	100										
					September	100										
Oktober	100															
3	Persentase layanan	%	100	Januari	100	100	100	Laporan layanan	Administrasi Keuangan	9.176.951.712	Januari	153.000.000	368.367.212	240,76	Kegiatan Administrasi	

		kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan			Pebruari	100	100	100	kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan disusun tiap bulan	Perangkat Daerah		Pebruari	450.000.000	588.561.759	130,79	Keuangan Perangkat Daerah belum memenuhi target 100% karena disesuaikan dengan pembayaran gaji dan kebutuhan bulan Mei bulan 2026
					Maret	100	100	100				Maret	900.000.000	1.001.592.783	111,29	
					April	100	100	100				April	1.300.000.000	710.187.222	54,63	
					Mei	100	100	100				Mei	900.000.000	621.333.387	69,04	
					Juni	100						Juni	900.000.000			
					Juli	100						Juli	1.600.000.000			
					Agustus	100						Agustus	600.000.000			
					September	100						September	600.000.000			
					Oktober	100						Oktober	600.000.000			
					Nopember	100						Nopember	600.000.000			
					Desember	100						Desember	573.951.712			
4		Persentase layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	Januari	100	100	100	Laporan layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan disusun tiap bulan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	178.521.121	Januari	0	-	-	
					Pebruari	100	100	100				Pebruari	10.000.000	806.000	8,06	
					Maret	100	100	100				Maret	20.000.000	6.312.000	31,56	
					April	100	100	100				April	30.000.000	16.253.650	54,18	
					Mei	100	100	100				Mei	10.000.000	22.513.205	225,13	
					Juni	100						Juni	10.000.000			
					Juli	100						Juli	10.000.000			
					Agustus	100						Agustus	10.000.000			
					September	100						September	10.000.000			
					Oktober	100						Oktober	10.000.000			
					Nopember	100						Nopember	10.000.000			
					Desember	100						Desember	48.521.121			
5		Persentase layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	Januari	100	100	100	Laporan layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan disusun tiap bulan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	796.150.394	Januari	0	24.978.746	0,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sudah melebihi realisasi keuangan disesuaikan dengan kebutuhan bulan Mei 2026
					Pebruari	100	100	100				Pebruari	10.000.000	34.716.004	347,16	
					Maret	100	100	100				Maret	30.000.000	71.233.609	237,45	
					April	100	100	100				April	50.000.000	66.898.129	133,80	
					Mei	100	100	100				Mei	70.000.000	73.532.894	105,05	
					Juni	100						Juni	50.000.000			

No	Sasaran Strategis (Program)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan	Program	Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Tersedianya Dokumen Umum,Kepegawaian dan Keuangan tepat waktu	1	Laporan	12	Januari	1	1	100		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.099.167.106	Januari	153.000.000	360.509.774	235,63	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pencairan disesuaikan dengan kebutuhan Mei Maret 2026
					Pebruari	1	1	100	Pebruari			400.000.000	588.561.759	147,14		
					Maret	1	1	100	Maret			800.000.000	996.560.133	124,57		
					April	1	1	100	April			800.000.000	703.742.178	87,97		
					Mei	1	1	100	Mei			800.000.000	614.888.343	76,86		
					Juni	1	1	100	Juni			800.000.000				
					Agustus	1	1	100	Agustus			800.000.000				
					September	1	1	100	September			800.000.000				
					Oktober	1	1	100	Oktober			800.000.000				
					Nopember	1	1	100	Nopember			992.685.668				
					Desember	1	1	100	Desember	1.153.481.438						
					Januari	1	1	100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	51.649.204	Januari	0	5.709.090	100	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN belum memenuhi target 100% disesuaikan dengan kebutuhan bulan Mei 2026	
					Pebruari	1	1	100			Pebruari	5.000.000	-	0		
					Maret	1	1	100			Maret	5.000.000	2.884.302	57,69		
					April	1	1	100			April	5.000.000	4.296.696	85,93		
					Mei	1	1	100			Mei	5.000.000	4.296.696	85,93		
					Juni	1	1	100			Juni	5.000.000				
					Juli	1	1	100			Juli	5.000.000				
					Agustus	1	1	100	Agustus	5.000.000						

										April	1	1	100					1.000.000	1.687.200	168,72	diseuaikan dengan kebutuhan bulan Mei 2026
										Mei								1.000.000	2.852.700	285,27	
										Juni								1.000.000			
										Juli								1.000.000			
										Agustus								1.000.000			
										September								1.000.000			
										Oktober								1.000.000			
										Nopember								1.000.000			
										Desember								5.746.210			
										Januari								0	-	0	
									Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.585.000	April	1	1	100				750.000	806.000	107,47	
													Maret						500.000	728.000	145,60
													April						1.000.000	754.000	75,40
													Mei						1.000.000	780.000	78,00
													Juni						1.000.000		
													Juli						1.000.000		
													Agustus						1.000.000		
													September						1.000.000		
													Oktober						1.000.000		
													Nopember						1.000.000		
											Desember						1.335.000				
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.555.930	Januari								0	-	0
													Pebruari						1.000.000		0
													Maret						1.000.000	420.000	42,00
													April						1.000.000	-	0
													Mei						1.000.000	7.582.605	758,26
													Juni						1.000.000		
																					Fasilitasi Kunjungan Tamu sudah memenuhi target karena disesuaikan dengan kebutuhan bulan Mei 2026

